

Media Cetak	Ujungpandang Ekspres
Tanggal	Senin 17 Februari 2025
Wilayah	Kota Makassar



Pemkot Siapkan Rp8,3 Miliar untuk Pemberdayaan Masyarakat

Pemkot Siapkan Rp8,3 Miliar untuk Pemberdayaan Masyarakat

■ Pengembangan Kampung B2SA, Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

MAKASSAR, UPEKS—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyiapkan dukungan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Salah satunya melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Makassar dengan alokasi anggaran mencapai Rp8,3 miliar.

"Secara keseluruhan anggaran sekitar Rp8,3 miliar yang terdiri dari beberapa kegiatan," kata Alamsyah Sahabuddin, Kepala DKP Makassar, Minggu (16/2/2025).

Alamsyah menerangkan, prog-

ram pemberdayaan masyarakat tersebut terdiri dari pengembangan Kampung Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), kemiskinan ekstrem serta stunting yang juga sesuai dengan program pemerintah pusat.

Kendati demikian, lanjutnya, anggaran tersebut juga akan menyelaraskan dengan visi dan

misi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Persiapan pelaksanaan masih dalam perencanaan. Anggaran belum fix dan juga tentunya menyesuaikan dengan visi misi wali kota dan wakil wali kota terpilih," kata Alamsyah.

Ia menjelaskan, pengembangan Kampung B2SA diterapkan melalui penyaluran bantuan benih dan bibit pangan

kepada warga binaan atau melalui Kelompok Wanita Tani (KWT). Kemiskinan ekstrem berupa penyaluran cadangan pangan pemerintah.

"Tahun ini cadangan pangan mencapai 90 ton beras. Cadangan tersebut siap disalurkan kapan saja. Selain itu, ada pula pemberian stimulan kepada warga," katanya.

Sementara penanganan ekstrem menjadi tanggung jawab seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DKP Makassar, katanya, ikut serta sebagai sup-

porting dalam penanganan stunting di Kota Makassar.

"Leading sektor stunting di Dinas Kesehatan, tetapi semua OPD ikut ambil bagian karena ini juga instruksi dari pemerintah pusat," katanya.

Lebih lanjutnya, kegiatan pemberdayaan masyarakat ini ditargetkan berjalan mulai Maret hingga akhir 2025. Target tersebut sesuai dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SI-RUP) milik Pemkot Makassar. (rul/hms)